

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mashudi dan Padmono Wibowo. 2018, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Nista Mitra Sejati, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Nawawi Barda. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. cetakan ke-3, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Amirko
- Raardjo Satjipto. 2002. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, ALFABETA, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mahmudi. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Subana, dan Sudrajat. 2011. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka Setia, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*, FH Universitas Diponegoro, Semarang.

Sujatno, Adi. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta.

Susanti, Dyah Octarina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nnomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5359;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57;

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

C. Penulisan Hukum

Rahmati, Daffah Ulfi, 2018, *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, dan Terorisme*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Muhammad Ridwan, 2016, *Remisi Tambahan pada Narapidana Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Achmad Surya, 2012, *Tesis Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Internet

Pramesti, Tri Jata Ayu, Tri Jata Ayu Pramesti, “Prosedur Pemberian Remisi”, www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/prosedur-pemberian-remisi/, diakses pada 6 November 2019, pukul 18.15 WIB.

Sistem Database Pemasyarakatan.
<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/page/300>, diakses 18 November 2019.

Saragi, Marry Margaretha, “Soal Remisi Dasawarsa”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa/>, diakses 21 Februari 2020.

Rufaidah, Anne, “Lapas Anak Berbuah Jadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak”
diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1029405/13/lapas-anak-berubah-jadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-1438691149>, diakses 19 Februari 2020.

“Transformasi Sistem Perlakuan Anak LAPAS Anak Menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak” <http://mx2.ditjenpas.go.id/transformasi-sistem-perlakuan-anak-lapas-anak-menjadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>, diakses pada 12 Februari 2020.

“Pemasyarakatan Wujudkan Transparansi Pemberian Hak Narapidana”,
<https://www.kemenkumham.go.id/berita/pemasyarakatan-wujudkan-transparansi-pemberian-hak-narapidana>, diakses pada 3 Maret 2020.